



RENJA PERUBAHAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025

Disusun oleh
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan daerah. Renja Perubahan ini juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan terarah.

Sebagai dokumen perencanaan yang strategis, Renja Perubahan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh program yang dirancang dapat berjalan secara optimal, terukur, serta berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, sehingga setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan, kolaborasi, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renja Perubahan ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar yang kokoh dalam upaya bersama untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Kabupaten Lamongan yang lebih maju dan berdaya saing.

Lamongan, Juli 2025

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LAMONGAN



ETIK SULISTYANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710712 199203 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	5
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
1.3. Perubahan Program dan Kegiatan	20
BAB IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PD	24
BAB V. PENUTUP	35
1.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan	35
1.2. Rencana tindak lanjut.	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Triwulan II Tahun 2025	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan	14
Tabel 2.3	Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	17
Tabel 4.1	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan. Renja memiliki kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD), dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJP, dan RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan ini berpedoman pada Ranwal RPJMD Tahun 2025 - 2029 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah sebagai pedoman :

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan Perangkat Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan ;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat :

- 1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 1.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 1.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 1.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tabel rencana program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat :

- 1.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- 1.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- 1.3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Kualitas Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan untuk :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak atau yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD 2024 S/D Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Evaluasi Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Pada tahun 2024 total anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Rp. 6.415.228.090,- (enam milyar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah) yang dialokasikan untuk 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan, 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.843.799.356,- (lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91,09 %. Sedangkan untuk pencapaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2025 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan pencapaian Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD 2024 dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi Tahun 2024 (Tahun N- 1) Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Dengan Tahun Berjalan (2025)	
														Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	88 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	86 Nilai	100%	87 Nilai		
1	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil	80 %	80 %	80 %	80 %	100%	80 %	46,57 %	58,21 %
1	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	80 %
1	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil	80 %	80 %	80 %	80 %	100%	80 %	44,96 %	56,2 %
1	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100%	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	100 %
1	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		
1	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi Tahun 2024 (Tahun N- 1) Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Dengan Tahun Berjalan (2025)	
														Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Triwulan/ Semesteran SKPD	Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD								
1	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	0	0	0
1	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	70 Paket	0	0	100%	0	0	0
1	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	70 Orang	0	0	100%	0	0	0
1	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	38,82 %	38,82 %
1	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	20,89 %
1	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	15 Paket	39,50 %
1	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	21 Paket	21 Paket	100%	21 Paket	21 Paket	31,29 %
1	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	40,04 %
1	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	38,33 %
1	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	52,68 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi Tahun 2024 (Tahun N- 1) Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Dengan Tahun Berjalan (2025)	
														Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	0	0
1	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	0
1	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	65,02 %	65,02 %
1	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	0
1	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	34,99 %
1	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	76,58 %
1	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	38,47 %	38,47 %
1	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	41,58 %
1	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	9,99 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi Tahun 2024 (Tahun N- 1) Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Dengan Tahun Berjalan (2025)	
														Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0	0
4	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase jumlah koperasi yang berizin	75,00 %	70,00 %	70,50 %	88,31 %	125,26 %	75 %	0	0
4	2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penerbitan izin usaha simpan pinjam	10 %	10 %	10 %	10 %	100%	10 %	0	0
4	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	100%	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	48,87 %
5	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berstatus dalam pengawasan	1,2 %	1,47 %	1,3 %	1,31%	100,77%	1,25 %	0	0
5	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	10 %	10 %	10 %	10 %	100%	10 %	0	0

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi Tahun 2024 (Tahun N- 1) Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Dengan Tahun Berjalan (2025)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
							Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									
5	2	17	03	2.01	0003		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	99,41 %
5	2	17	03	2.01	0004		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	100%	120 Unit Usaha	0	7,05 %
6	2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah koperasi yang sehat	10,50 %	10,50 %	10,50 %	10,50 %	100%	10,50 %	0	0
6	2	17	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya	10 %	10 %	10 %	10 %	100%	10 %	0	0
6	2	17	04	2.01	0001		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	100%	80 Unit Usaha	0	2,34 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi Tahun 2024 (Tahun N- 1) Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Dengan Tahun Berjalan (2025)	
														Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	19 %	19 %	19 %	19 %	100%	19 %	0	0
7	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah SDM Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	10 %	10 %	10 %	10 %	100%	10 %	0	0
7	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100%	0 Orang	0	0
8	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	100%	6,00 %	0	0
8	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diberikan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha, kemitraan, pemasaran dan pembiayaan	10 %	10 %	10 %	10 %	100%	10 %	0	0
8	2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0	0	0	0	0	420 Unit Usaha	420 Unit Usaha	90,62 %
8	2	17	06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%	420 Unit Usaha	420 Unit Usaha	90,62 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi Tahun 2024 (Tahun N- 1) Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Dengan Tahun Berjalan (2025)	
														Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%	100 Unit Usaha	0	0
9	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	presentase peningkatan aset usaha mikro	56,00 %	56,00 %	56,00 %	56,00 %	100%	56,00 %	00	
9	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase peningkatan usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan usaha	10 %	10 %	10 %	10 %	100%	10 %	0	0
9	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	100%	70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	87,05 %
9	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	100%	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	10,21 %
9	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%	50 Unit Usaha		0
10	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	presentase penumbuhan usaha mikro	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	100%	2,50 %	0	0
10	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Prosentase peningkatan usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha	10 %	10 %	10 %	10 %	100%	10 %	0	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi Tahun 2024 (Tahun N- 1) Yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun Berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Dengan Tahun Berjalan (2025)	
														Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
10	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	128 Unit Usaha	128 Unit Usaha	128 Unit Usaha	128 Unit Usaha	100%	128 Unit Usaha	0	0
10	2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	0	0
10	2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	240 Unit Usaha	240 Unit Usaha	240 Unit Usaha	240 Unit Usaha	100%	240 Unit Usaha	0	0
10	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	100%	120 Unit Usaha	0	93,72 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase Usaha Mikro yang naik Kelas			3,4	3,6	3,8	4	3,25	3,43	3,63	3,8	4	
2	Prosentase Koperasi Berkualitas			70	72	73	75	68,30	70,94	73,36	73	75	
3	Prosentase Koperasi Aktif			92	93	94	95	91,53	92,07	93,98	94	95	
4	Prosentase Peningkatan pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi permodalan			16,6	17	17,4	17,8	16,46	16,62	17,12	17,4	17,8	
5	Nilai SAKIP			85	86	87	88	84	85	86	87	88	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, riset dan inovasi karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Lamongan adalah :

1. Memberikan kemudahan perizinan usaha koperasi
2. Memberikan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill pelaku usaha mikro
3. Memberikan Sosialisasi terkait kemudahan akses permodalan
4. Fasilitasi Pembuatan legalitas produk beserta design produknya
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan non Perbankan

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3

Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Lamongan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, adalah:

- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa,
- Peningkatan infrastruktur konektivitas,
- Pengembangan transisi energi,
- Percepatan infrastruktur IKN,
- Reformasi pengelolaan sampah;
- Serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan

Sedangkan kebijakan dalam RPJMD yang ingin ditetapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sesuai Visi dan Misi adalah :

- Meningkatkan kapasitas SDM dan manajemen
- Meningkatkan fasilitasi permodalan dan pemasaran serta kemitraan.
- Pengembangan pasar luar negeri dan ekspor
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- Pengembangan UMKM dan Koperasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, adalah:

Visi Pemerintahan kabupaten Lamongan adalah :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Misi ke 1 (satu) sebagai berikut :

“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan”.

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro**
- 2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah**

3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Rumusan rencana perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2025 berdasarkan strategi dan kebijakan, ada sebanyak 8 (delapan) program, 14 (empat belas) kegiatan, 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan rencana anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 6.995.294.769,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari dana APBD dan APBN.

Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Lamongan melalui 8 program dengan 14 kegiatan, adapun program kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- 1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

E. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

F. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

G. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
 - b. Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

H. Program Pengembangan UMKM

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro
 - b. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
 - d. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja perubahan dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu : “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan” dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Yang Akseleratif Dan Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Cata tan
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Bertambah/ Berkurang	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.023.914.548	8.186.235.70 6	1.162.321.158	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							7.023.914.548	8.186.235.70 6	1.162.321.158	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	87	Nilai IKM	87			4.929.914.548	5.307.235.70 6	377.321.158	
2	17	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	87	Nilai IKM	87			60.000.000	60.000.000	-	
2	17	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokume n	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	60.000.000	60.000.000	-	
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.764.643.672	4.413.443.00 0	648.799.328	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Catatan
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Bertambah/ Berkurang	
2	17	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang / bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang / bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3.734.643.672	4.383.443.000	648.799.328	
2	17	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporam hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporam hasil koordinasi penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	15.000.000	15.000.000	-	
2	17	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan lapran koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	umlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan lapran koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	15.000.000	15.000.000	-	
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	137.084.859	141.565.317	4.480.458	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Catatan
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Bertambah/ Berkurang	
2	17	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 paket	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	22.562.800	24.406.300	1.843.500	
2	17	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	22.142.559	24.539.017	2.396.458	
2	17	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik yang disediakan	21 paket	Jumlah Paket bahan logistik yang disediakan	21 paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	20.702.100	22.297.400	1.595.300	
2	17	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	7 paket	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	7 paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	17.026.400	18.943.900	1.917.500	
2	17	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10.500.000	11.500.000	1.000.000	
2	17	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	44.151.000	39.878.700	(4.272.300)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Cata tan
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Bertambah/ Berkurang	
2	17	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100	prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	41.891.500	41.890.700	(800)	
2	17	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	41.891.500	41.890.700	(800)	
2	17	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100	prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	783.263.341	512.412.371	(270.850.970)	
2	17	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	492.800	1.120.000	627.200	
2	17	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	159.846.541	120.791.371	(39.055.170)	
2	17	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	622.924.000	390.501.000	(232.423.000)	
2	17	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 mobil, 5 motor	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 mobil, 5 motor	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	143.031.176	137.924.318	(5.106.858)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Cata tan
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Bertambah/ Berkurang	
2	17	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	118.524.341	118.524.341	-	
2	17	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	24.506.835	19.399.977	(5.106.858)	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase Koperasi yang berizin	75	Presentase Koperasi yang berizin	75	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75.000.000	59.143.000	(15.857.000)	
2	17	02	2,02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Koperasi yang berizin	75	Presentase Koperasi yang berizin	75	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75.000.000	59.143.000	(15.857.000)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Cata tan
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Bertambah/ Berkurang	
2	17	02	2,02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	2 unit usaha	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	2 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75.000.000	59.143.000	(15.857.000)	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Koperasi berstatus dalam pengawasan	1,25	Prosentase Koperasi berstatus dalam pengawasan	1,25	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	239.960.000	239.960.000	-	
2	17	03	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Koperasi berstatus dalam pengawasan	1,25	Prosentase Koperasi berstatus dalam pengawasan	1,25	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	239.960.000	239.960.000	-	
2	17	03	2,01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 unit usaha	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	204.960.000	204.960.000	-	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Cata tan
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Bertambah/ Berkurang	
2	17	03	2,01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	120 unit usaha	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	120 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	35.000.000	35.000.000	-	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase koperasi yang sehat	10,5	Prosentase koperasi yang sehat	10,5	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	165.000.000	165.000.000	-	
2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase koperasi yang sehat	10,5	Prosentase koperasi yang sehat	10,5	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	165.000.000	165.000.000	-	
2	17	04	2,01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	80 unit usaha	Jumlah Unit Usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	80 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	165.000.000	165.000.000	-	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	19	Presentase Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	19	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	0	39.521.100	39.521.100	
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	19	Presentase Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat	19	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	0	39.521.100	39.521.100	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Cata tan
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Bertambah/ Berkurang	
2	17	05	2,01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian		Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	0	39.521.100	39.521.100	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	6%	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	6%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	110.000.000	711.335.900	601.335.900	
2	17	06	2,01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	6%	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	6%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	110.000.000	711.335.900	601.335.900	
2	17	06	2,01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan		625.000.000	625.000.000	
2	17	06	2,01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koerasi yang difasilitasi permodalannya	100 unit usaha	jumlah koerasi yang difasilitasi permodalannya	100 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50.000.000	26.335.900	(23.664.100)	
2	17	06	2,01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	koperasi denga keanggotaan daerah kabupaten / kota	300 unit usaha	koperasi denga keanggotaan daerah kabupaten / kota	300 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	60.000.000	60.000.000	-	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,	Prosentase Peningkatan Aset usaha Mikro	56	Prosentase Peningkatan Aset usaha Mikro	56	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	779.040.000	779.040.000	-	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Cata tan
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Bertambah/ Berkurang	
					DAN USAHA MIKRO (UMKM)										
2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase Peningkatan Aset usaha Mikro	56	Prosentase Peningkatan Aset usaha Mikro	56	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	779.040.000	779.040.000	-	
2	17	07	2,01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	240 unit usaha	Jumlah usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	240 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	584.040.000	584.040.000	-	
2	17	07	2,01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	40 unit usaha	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	40 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	155.000.000	170.000.000	15.000.000	
2	17	07	2,01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terdata	100 unit usaha	Jumlah Usaha Mikro yang terdata	100 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	40.000.000	25.000.000	(15.000.000)	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Penumbuhan Usaha Mikro	2,50	Presentase Penumbuhan Usaha Mikro	2,50	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	725.000.000	885.000.000	160.000.000	
2	17	08	2,01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Presentase Penumbuhan Usaha Mikro	2,50	Presentase Penumbuhan Usaha Mikro	2,50	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	725.000.000	885.000.000	160.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi		Perubahan/ Pergeseran Alokasi Anggaran			Catatan
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum	Sesudah	Sesudah	Sebelum	Bertambah/ Berkurang	
2	17	08	2,01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	120 unit usaha	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	120 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	25.000.000	185.000.000	160.000.000	
2	17	08	2,01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang difasilitasi	40 orang	Jumlah yang difasilitasi	40 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	25.000.000	25.000.000	-	
2	17	08	2,01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	240 unit usaha	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	240 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	650.000.000	650.000.000	-	
2	17	08	2,01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	120 unit usaha	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	120 unit usaha	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	25.000.000	25.000.000	-	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih periode 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan” pada misi 1 yaitu “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah”. yang dioperasionalkan melalui rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2025. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan dokumen renja perubahan ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kabupaten diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Malaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUAS) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.